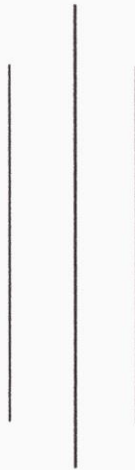




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KE WEBSITE
LAMAN JARINGAN DOKUMENTASI INFORMASI HUKUM

NOMOR : 140/HK.03.2-Kpt/1802/Kab/VII/2020
TANGGAL : 22 Juli 2020



SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2020

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Standar Operasional Prosedur ini dibuat sebagai panduan Subbagian Hukum dalam penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah dan prosedur pengunggahan produk hukum komisi pemilihan umum Kabupaten Lampung Tengah ke website laman jaringan dokumentasi informasi hukum;
3. Standar Operasional Prosedur ini dapat dilakukan *review* atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali setahun;
4. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Bandar Lampung

Pada tanggal 22 Juli 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,



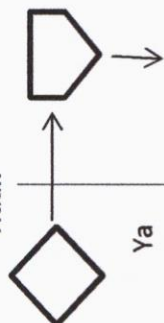
MUHAMMAD FAIZAL

 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH	Nomor SOP	:	140/HK.03.2-Kpt/1802/Kab/VII/2020
	Tanggal Pengesahan	:	22 Juli 2020
	Disahkan oleh	:	SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,
	Nama SOP	:	MUHAMMAD FAIZAL
			PENGUNGGAHAN PRODUK HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH KE WEBSITE JDIH
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA	
1.	Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;	1.	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah;
2.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784);	2.	Memahami alur pendokumentasian Salinan Keputusan KPU Kabupaten Lampung Tengah;
3.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);	3.	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4.	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019	4.	Memahami Sistem Informasi Website JDIH.

	tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
1. SOP Pedoman Tata Naskah Dinas; 2. SOP Tata Usaha Pimpinan; 3. SOP Penyusunan Keputusan KPU; 4. SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU; 5. SOP Tata Usaha Biro Umum; 6. SOP Dokumentasi dan Informasi Hukum.	1. Buku Agenda 2. Perangkat Komputer, Printer dan Scanner 3. Flashdisk dan Map Ordner; 4. Stempel Salinan; 5. Cap Dinas.	
PERINGATAN	PENCATATAN/PENDATAAN	
	Disimpan dalam bentuk naskah asli (<i>hardcopy</i>) dan naskah asli elektronik (<i>softcopy</i>).	

FLOWCHART PENERBITAN PRODUK HUKUM KPU KE WEBSITE JDIH

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU		KET
		Sekretaris	Kepala Subbagaian Hukum	Pengelola JDIH	Penerbit	Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(10)	(11)
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan Salinan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Tengah ke Website JDIH berupa Naskah Asli (<i>Hardcopy</i>) yang telah di Tanda Tangani oleh Ketua KPU atau Sekertaris KPU							Nota Dinas	File asli
2.	a. Menerima Nota Dinas permohonan penerbitan produk hukum KPU Kabupaten Lampung Tengah ke Website JDIH b. Menyampaikan lembar Disposisi							Scan Produk Hukum	File asli dan Salinan Produk Hukum
3.	Persetujuan Penerbitan Produk Hukum KPU Kabupaten Lampung Tengah							Lembar Disposisi	

4.	Cek Salinan Produk Hukum dan persetujuan penerbitan Produk Hukum Kabupaten Lampung Tengah Lampung di Website JDIH	Tidak Ya 						Persetujuan File sesuai dengan asli	
5.	Melakukan Scan Produk Hukum							Lembar Disposisi	
6.	Cek kelengkapan Dokumen Produk Hukum beserta Disposisi							Dokumentasi Hasil Scan dari	
7.	Mengunggah Produk Hukum ke Webiste JDIH							Form Persetujuan yang telah di Tanda Tangani Kasubbag Hukum	Tampil di halaman website JDIH